

ABSTRAK

Masyarakat Rohingya, salah satu kelompok etnis di Myanmar, telah mengalami berbagai macam bentuk kekerasan dan diskriminasi akibat daripada tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar yang berujung pada aksi genosida. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif dimana memiliki tujuan untuk mencari ataupun menawarkan solusi atas kasus. Dengan jenis data, data sekunder yang dikumpulkan secara studi kepustakaan dan kajian dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilandaskan pada Pasal 6 Statuta Roma, krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap masyarakat etnis Rohingnya adalah benar merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat berupa genosida, sebab telah memenuhi unsur-unsur genosida. Dalam hal ini, Pemerintah Myanmar secara sistematis telah membunuh, menyebabkan kehancuran fisik terhadap kelompok, dan melakukan tindakan pencegahan kelahiran pada etnis Rohingya. Untuk menghentikan genosida ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa harus bertindak menggunakan prinsip *Responsibility to Protect* melalui intervensi ekonomi dan politik. Intervensi tersebut harus dilakukan dengan lebih tegas dan kompak demi menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat etnis Rohingya di Myanmar yang berbentuk negosiasi, embargo militer, dan pembekuan aset seluruh warga negara Myanmar.

Kata Kunci : Genosida, Rohingya, Prinsip *Responsibility to Protect*

ABSTRACT

The Rohingya people, one of many ethnic groups in Myanmar, have suffered countless forms of violence and discrimination by the Myanmar government that has ended in genocide. This thesis will delve into the root of why the genocide occurred and how to solve it. The approach used to write this thesis is the normative juridical approach through secondary data collected through literature and document review. The research specifications used is prescriptive research with an analytical qualitative data method. Based on the writer's analysis and the 6th article of the Statute of Rome, the humanitarian crisis that the Rohingya people suffered constitutes as genocide as it fulfills the elements of genocide. More specifically, that the Myanmar government has systematically killed, caused the physical destruction of the group, and carried out measures to prevent birth among the Rohingya people. In order to stop this genocide, the United Nations must act through economic and political intervention under the umbrella of the principle of the Responsibility to Protect. The Responsibility to Protect is a principle that states that every country should guarantee the fulfillment of human rights for every person. These interventions must be carried out in a more compact and assertive manner than previously done to stop all forms of violence against the Rohingya people, through negotiation, military embargoes, and asset freezing.

Keywords: Genocide, Rohingya, Responsibility to Protect